



ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK, BEA BALIK NAMA, DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2014-2018

Muhammad Abdul Muis¹

Politeknik Bisnis dan Pasar Modal, Jakarta, Indonesia
mam@bcm.ac.id

Satria Adhitama²

Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang, Indonesia
satria.bc@pknstan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness and contribution of motor vehicle tax, motor vehicle transfer fees, motor vehicle fuel tax on the original revenue of DKI Jakarta Province in 2014-2018. This study uses a qualitative descriptive method with secondary data obtained from local government financial reports through the official website of the Jakarta Information and Documentation Service. The data analysis technique used is the effectiveness analysis method with the effectiveness ratio and the contribution analysis method. The results in this study indicate that there is an effectiveness of the realization of the motor vehicle tax with a very good level of effectiveness, and the motor vehicle excise tax and motor vehicle fuel tax with a good level of effectiveness with the percentage fluctuating from year to year. The Motor Vehicle Tax contributes and the Motor Vehicle Transfer Fee has a low contribution rate to the original revenue of DKI Jakarta Province and the Motor Vehicle Fuel Tax has a very low contribution rate to the original revenue of the DKI Jakarta Province.

Keywords: contributions, customs, effectiveness, province, taxes

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap PAD DKI Jakarta tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah melalui situs resmi Dinas Informasi dan Dokumentasi Jakarta. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis efektivitas dengan rasio efektivitas dan metode analisis kontribusi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat efektivitas realisasi pajak kendaraan bermotor dengan tingkat efektivitas yang sangat baik, dan bea cukai kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan tingkat efektivitas yang baik dengan persentase yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki tingkat kontribusi kurang terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memiliki tingkat kontribusi sangat kurang terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta.

Kata Kunci: Efektivitas, kendaraan bermotor, kontribusi, pajak, provinsi

Klasifikasi JEL: J38

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki bentuk pemerintahan Republik Konstitusional dengan sistem pemerintahan berupa sistem Presidensial. Indonesia merupakan negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan ialah salah satu bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Pemerintahan pusat pada negara kesatuan memiliki otoritas tertinggi dan wilayah-wilayah administratif di bawahnya menjalankan kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat. Indonesia memiliki 34 provinsi sebagai wilayah administratif. (indonesia.go.id).

Dalam pelaksanaannya, Indonesia menganut sistem otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah memiliki definisi berupa hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, UU ini juga mendefinisikan daerah otonom berupa kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intinya, pemerintah daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Kewenangan yang dimaksud dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut di antaranya

adalah moneter dan keuangan. Menurut Amrah Muslimin desentralisasi adalah kewenangan-kewenangan oleh pemerintah pusat pada badan-badan otonom (swatantra) yang berasal di daerah-daerah. Penyerahan kewenangan yang dilakukan dalam rangka desentralisasi ini tentunya disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Riduansyah, 2007)

Pada realisasinya PAD memiliki peranan untuk penerimaan pemerintah. Berikut adalah realisasi penerimaan pemerintah provinsi DKI Jakarta sesuai tabel 1.1 pada lampiran. Peranan tersebut berupa penerimaan PAD yang cukup tinggi dari penerimaan pemerintah dengan jenis lainnya.

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan (djpk.kemenkeu.go.id). Selain itu, pajak merupakan sumber penerimaan yang berkontribusi bagi pemerintah pusat maupun daerah. Pajak daerah yang merupakan bagian dari PAD digunakan untuk pendanaan rutin antara lain belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan Pemerintah Daerah (klikpajak.id).

Saat ini penerimaan tertinggi PAD DKI Jakarta bersumber dari Pajak Daerah yang terlampir pada tabel 1.2. terlampir. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa setiap tahun, pajak daerah terus meningkat untuk penerimaan PAD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar

kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak burung sarang walet, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta BPHTB.

Sering dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh kalangan atas, juga kalangan bawah. Dewasa ini transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang cukup penting bagi masyarakat. Alat transportasi dianggap wajib bagi masyarakat karena dapat menunjang kegiatan dalam beraktivitas (Aprilliyana, 2017).

Saat ini penggunaan kendaraan bermotor terus mengalami tren kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pencatatan dalam situs databoks berdasarkan data statistik transportasi DKI Jakarta di mana mobil penumpang tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 6,48% per tahun pada periode 2012-2016. (katadata.co.id).

Begitu pun dengan penerimaan Pajak Daerah Provinsi yang erat kaitannya dengan kendaraan bermotor yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang memiliki penerimaan terbesar dari seluruh jenis pajak daerah provinsi, sesuai dengan Tabel I.3. (terlampir).

Penelitian tentang efisiensi dan efektivitas pajak daerah terhadap PAD sudah pernah dilakukan oleh Julastiana dan Suartana (2013) dan Enggar, Rahayu, dan Wahyudi (2011). Penelitian tersebut dilakukan di tempat yang berbeda yaitu Klungkung (Bali) dan Jambi. Penelitian tersebut menganalisis efisiensi dan efektivitas pajak daerah dan retribusi

daerah terhadap PAD. Akan tetapi, terdapat keterbatasan dalam penelitian tersebut di mana dalam penelitian tersebut hanya dilakukan perhitungan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah secara global dan tidak dibahas kontribusinya serta tidak adanya perhitungan serta alasan naik turunnya efektivitas, efisiensi, serta kontribusi secara lebih rinci. Maka dari itu penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya, yaitu dengan melakukan perhitungan efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah secara lebih rinci.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pencapaian pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta efektif?
2. Apakah tingkat pencapaian pungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta efektif?
3. Apakah tingkat pencapaian pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta efektif?
4. Apakah terdapat tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta ?
5. Apakah terdapat tingkat kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta ?
6. Apakah terdapat tingkat kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta ?

3. LANDASAN TEORI

3.1. Keuangan Daerah

Berdasarkan uraian Moh. Khusaini (2018:2) keuangan daerah adalah semua hak dan juga kewajiban yang dilakukan pemerintah daerah dalam bentuk uang (Rupiah), di mana hal tersebut dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

3.2. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Nurkholis dan Khusaini (2019:23) yang dimaksud dengan rencana keuangan tahunan adalah anggaran yang dihitung mulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah

yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan hasil PAD lain-lain yang sah dan bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari asas desentralisasi.

Sumber-sumber untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah oleh pemerintah daerah adalah:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

3.4. Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H . dalam Mardiasmo (2013:1), pajak merupakan iuran pajak kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3.5. Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 (enam belas) jenis pajak, yaitu :

- a. (empat) jenis pajak Provinsi:
- b. Pajak Kendaraan Bermotor
- c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- e. Pajak Permukaan Air
- f. Pajak Rokok

11 (sebelas) Jenis Pajak Kabupaten/Kota:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Reklame
- c. Pajak Restoran

- d. Pajak Hiburan
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

3.6. Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Damas Dwi Anggoro (2017:118) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

3.7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Anggoro (2017:127) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam badan usaha.

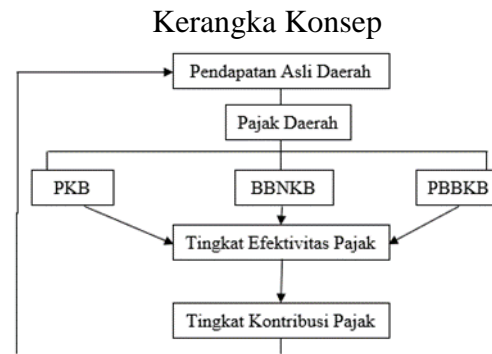
3.8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Menurut Anggoro (2017:132) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang berupa semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

3.9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Menurut Damas Dwi Anggoro (2017:132) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas

penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang berupa semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.



Sumber : Diolah penulis, 2020

4. METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan perhitungan analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kontribusi.

Rasio Efektivitas menunjukkan suatu kemampuan yang dimiliki Pemerintah Daerah (Pemda) dalam merealisasikan apa yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Apriliani Grecia Kartini Atteng, Josep Bintang Kalangi, Jacline I. Sumual, 2019), di mana rumus rasio efektivitas tersebut dijabarkan sebagai berikut :

4.1. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan perhitungan analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kontribusi.

Rasio efektivitas menggambarkan pada suatu kemampuan yang dimiliki Pemerintah Daerah (Pemda) dalam realisasi yang direncanakan dibandingkan dengan target yang

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Apriliani Grecia Kartini Atteng, Josep Bintang Kalangi, Jacline I. Sumual, 2019), di mana rumus rasio efektivitas tersebut dijabarkan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Per – jenis Pajak}}{\text{Target Per – jenis Pajak}} \times 100$$

Tabel 4. 1. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Klasifikasi Kriteria Efektivitas	
Persentase	Kriteria
100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900 - 327, Tahun 1996 (dalam Fathiyah dkk, 2019).

Analisis kontribusi pajak sendiri merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap PAD (Octovido, dkk, 2014), di mana rumus rasio kontribusi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Per – jenis Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4. 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Klasifikasi Kriteria Kontribusi	
Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10% – 20%	Kurang
20,10% – 30%	Sedang
30,10% – 40%	Cukup Baik
40,10% – 50%	Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri, Tahun 2013 (dalam Yani Rizal, Miftahul Hidayah, 2018

5. HASIL ANALISIS DATA

Berdasarkan tabel 5.1 (pada lampiran) dapat dilihat tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2014 tingkat efektivitas berada pada angka 96,68% (efektif), alasan di balik efektifnya Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 yang tidak lebih besar dari efektivitas pajak tahun 2015 adalah adanya penghindaran pajak progresif pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oknum-oknum tertentu hingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 tingkat efektivitas meningkat menjadi 100,66% (sangat efektif). Adapun alasan di balik efektifnya Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 adalah adanya kenaikan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor untuk keseluruhan wilayah DKI Jakarta pada tahun 2014 sebesar 8.258.826 menjadi 8.697.064 pada tahun 2015. Pada tahun 2016, penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta kembali mengalami peningkatan pada angka 101,33% (sangat efektif) dan merupakan penerimaan tertinggi dalam kurun waktu 2014- 2018. Adapun penyebab sangat efektifnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 adalah adanya penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor hingga bulan Agustus 2016. Hal ini membuat banyak wajib pajak membayar pajak terutangnya tanpa harus membayarkan dendanya. Pada tahun 2017, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan di angka 103,30% (sangat efektif). Penyebab efektifnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 adalah adanya kenaikan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor dari tahun 2016 sebanyak

9.105.377 menjadi 9.464.077 keseluruhan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah DKI Jakarta di tahun 2017. Namun penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta mengalami penurunan pada tahun 2018 pada angka 102,44% walaupun masih pada tingkat sangat efektif. Hal tersebut disebabkan oleh terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor pribadi warga Jakarta mencapai Rp1,78 triliun. Nilai itu di antaranya berasal dari sekitar 700.000 unit kendaraan roda empat yang belum membayar pajak sebesar Rp1,2 triliun.

Sedangkan untuk tingkat efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2014 tingkat efektivitas berada pada angka 77,80% (kurang efektif). Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menaikkan target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2014. Dari data Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan realisasi penerimaan pajak dari Rp22,6 triliun di 2013 menjadi Rp32,5 triliun di tahun 2014 dengan besaran merinci target untuk penerimaan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp5,82 triliun di 2013 menjadi Rp6,4 triliun di 2014. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas naik sebesar 101,86% (sangat efektif). Kenaikan penerimaan tersebut terjadi karena Kantor Samsat Bersama DKI Jakarta melaksanakan program penghapusan sanksi administrasi atau denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penghapusan sanksi administrasi atau denda bea balik nama kendaraan bermotor tersebut dapat menambah efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor khususnya di tahun 2015. kebijakan ini dibuat berdasarkan Keputusan Kepala

Dinas Pelayanan Pajak Nomor: 2829/2015 tertanggal 12 November 2015. Pada tahun 2016 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta kembali meningkat pada angka 104,25% (sangat efektif). Hal itu tersebut disebabkan oleh dikeluarkannya kebijakan penghapusan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan pada tahun 2017 pada angka 100,54% (sangat efektif) dan kembali meningkat pada tahun 2018 di angka 104,91% (sangat efektif).

Untuk tingkat efektivitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2014 tingkat efektivitas berada pada angka 97,51% (efektif). Hal tersebut disebabkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan adanya kenaikan penerimaan pajak daerah hingga 43%. Di mana target realisasi penerimaan pajak dari Rp22,6 triliun di 2013 menjadi Rp32,5 triliun di tahun 2014 dengan rincian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor naik dari Rp1,1 triliun di 2013 menjadi Rp1,2 triliun di 2014. Namun pada tahun 2015 tingkat efektivitas mengalami penurunan sebesar 91,32% (efektif). Apabila Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk premium diturunkan, maka harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium bisa turun. Jika harga BBM tersebut dapat turun bukan tidak mungkin jika penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor akan bertambah dan akan berakibat pada efektivitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan kenyataannya keputusan pemerintah menetapkan harga premium di level Rp7.400 per liter. Dengan begitu harga beli premium masih lebih tinggi

dibandingkan dengan harga jualnya. Pada tahun 2016, penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta kembali meningkat pada angka 104,28% (sangat efektif) dan mengalami penurunan pada tahun 2017 pada angka 100,28% (sangat efektif). Penurunan persentase efektivitas pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini terjadi karena penurunan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta pada tahun 2016 sebesar 17.865 unit menjadi 6.216 di tahun 2017. Terjadi kenaikan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 di angka 103,73% (sangat efektif). Kenaikan persentase tersebut terjadi karena adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2017 sebesar 6.216 menjadi 19.836 di tahun 2018.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat banyak faktor yang mengakibatkan naik turunnya tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di mana kenaikan tersebut terjadi di antaranya disebabkan oleh adanya naik turunnya jumlah Wajib Pajak kendaraan bermotor wilayah DKI Jakarta, penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor, serta kurangnya optimalisasi pada objek pajak terkait.

Berdasarkan Tabel 5.1 pada lampiran diketahui tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2014 tingkat kontribusi berada pada angka 15,92% (kurang berkontribusi). Hal ini terjadi karena para agen tunggal pemegang merek (ATPM) mobil dipastikan segera menaikkan harga jual kendaraan. Siklus tahunan ini memang selalu terjadi pada awal tahun. Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian

memprediksi total penjualan mobil tahun 2014 naik sekitar 5 persen menjadi 1,3 juta unit dari tahun 2013 sekitar 1,2 juta unit. Pada tahun 2015 tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta meningkat sebesar 18,08% (kurang berkontribusi). Hal itu terjadi mengingat penghapusan sanksi administrasi sehingga realisasi pajak kendaraan bermotor dapat meningkat untuk memberikan kontribusi pada PAD Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2016 tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta kembali meningkat pada angka 19,37% (kurang). Sejak tahun 2014, kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2016 disebabkan oleh penghapusan denda pajak yang diberlakukan pemerintah DKI Jakarta. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta kembali mengalami penurunan di tahun 2017 di angka 18,24% (kurang). Penurunan persentase kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD ini terjadi lantaran persentase laju pertumbuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan wilayah DKI Jakarta juga mengalami penurunan hingga sebesar 3,9% dari tahun 2016 hingga tahun 2017. Hal itu berakibat pada penerimaan pajak kendaraan bermotor yang kurang maksimal untuk memenuhi PAD, namun mengalami kenaikan lagi dan merupakan kontribusi tertinggi di tahun 2018 pada angka 19,74% (kurang). Kenaikan ini sesuai dengan laju pertumbuhan wajib pajak kendaraan bermotor dari keseluruhan wilayah DKI Jakarta yang juga mengalami kenaikan pada tahun 2018. Laju pertumbuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2018 bertambah sebesar 4,4%.

Sedangkan jika dilihat tingkat kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI

Jakarta, pada tahun 2014 tingkat kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta berada pada angka 17,67% (kurang). Hal ini terjadi bersamaan dengan wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2014 sebesar 1.156.277 merupakan catatan wajib pajak terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 tingkat kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan menjadi 13,91% (kurang). Hal ini terjadi karena laju pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2015. PAD mengalami kenaikan hingga sebesar 7,71% dari tahun lalu yang lebih kecil. Sedangkan laju pertumbuhan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak mengalami kenaikan pada laju pertumbuhan yaitu sebesar minus 5,90%. Secara rinci penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2015 lebih kecil dari penerimaan pada tahun 2014. Pada tahun 2016 kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta kembali mengalami penurunan pada angka 13,57% (kurang). Hal ini terjadi karena adanya penurunan wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hanya mencapai 914.986 wajib pajak pada tahun 2016. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan di tahun 2017 pada angka 11,45% (kurang). Persentase tahun 2017 ini merupakan persentase kontribusi terkecil untuk jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Persentase tersebut masuk ke dalam kriteria kontribusi kurang karena besaran persentase kontribusinya kurang dari 20%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kurang berkontribusi terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017.

Hal itu terjadi karena laju pertumbuhan PAD yang meningkat hingga 19,01% sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor malah mengalami penurunan pada laju pertumbuhannya sebesar 0,46%. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan di tahun 2018 pada angka 12,35% (kurang). Hal itu terjadi karena laju pertumbuhan PAD menurun hingga minus 1,31% atau realisasi PAD Jakarta pada tahun 2018 lebih rendah dari tahun 2017. Rendahnya laju pertumbuhan PAD bersamaan juga dengan laju pertumbuhan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang meningkat hingga 6,43% jauh lebih tinggi dari tahun 2017 yang hanya mencapai 0,46%.

Terkait tingkat kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2014 tingkat kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta berada pada angka 3,74% (sangat kurang). Hal ini terjadi karena belum adanya pengoptimalan pada objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara keseluruhan. Salah satu objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang belum dioptimalkan adalah bahan bakar gas (BBG) yang hanya sedikit digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Berdasarkan data Dishub DKI bahwa hingga saat ini baru sekitar 5.000 angkutan umum yang menggunakan BBG dari total 14 ribu angkutan umum roda tiga yang beroperasi di Jakarta. Hal tersebut membuat penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menjadi tidak optimal. Pada tahun 2015 tingkat kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta menurun sebesar 3,66% (sangat kurang). Persentase tersebut masuk ke dalam kriteria

kontribusi sangat kurang karena besaran persentase kontribusinya kurang dari 10%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sangat kurang terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. Penurunan persentase kontribusi tersebut disebabkan oleh kenaikan harga BBM karena faktor nilai Rupiah yang melemah hingga ke level 13.000 per dolar AS. BBM sebagai objek pajak untuk mendapatkan realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan harga yang berdampak pada penerimaan pajak yang rendah terkait wajib pajak yang tidak mampu membayar pajak terutang tersebut. Pada tahun 2016 kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta juga mengalami penurunan pada angka 2,97% (sangat kurang). Persentase tersebut masuk ke dalam kriteria kontribusi sangat kurang karena besaran persentase kontribusinya kurang dari 10%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sangat kurang terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta tahun 2016. Hal tersebut terjadi karena laju pertumbuhan PAD tahun 2016 mencapai 9,50% dari tahun sebelumnya, berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang laju pertumbuhannya justru kurang dari tahun sebelumnya atau sebesar minus 11,19%. Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta kembali menurun di tahun 2017 pada angka 2,63% (sangat kurang). Persentase tersebut masuk ke dalam kriteria kontribusi sangat kurang karena besaran persentase kontribusinya kurang dari 10%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sangat kurang terhadap PAD tahun 2017. Hal tersebut terjadi karena jumlah kendaraan bermotor

tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 16.216 kendaraan bermotor. Kenaikan kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta di tahun 2018 pada angka 2,87% (sangat kurang). Persentase tersebut masuk ke dalam kriteria kontribusi sangat kurang karena besaran persentase kontribusinya kurang dari 10%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sangat kurang terhadap PAD tahun 2018. Hal itu terjadi karena laju pertumbuhan kendaraan bermotor tahun 2018 yang mengalami kenaikan yaitu sebesar 19.836.

Dari pencapaian persentase kontribusi realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap realisasi PAD tahun 2014-2018 seluruhnya tidak dapat mencapai 30% dari kontribusi PAD. Yang artinya selama periode 5 tahun tersebut Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak mampu mencapai klasifikasi kriteria sedang terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta.

6. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan materi di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dengan tingkat efektivitas yang tinggi di mana memiliki rata-rata penerimaan selama 4 tahun sebesar 100,88%. Persentase setiap tahun atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah tahun 2014 sebesar 96,68%, tahun 2015 sebesar 100,66%,

- tahun 2016 sebesar 101,33%, tahun 2017 sebesar 103,30%, dan tahun 2018 sebesar 102,44%. Hal itu disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menaikkan target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2014. Berdasarkan data Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan realisasi penerimaan pajak dari Rp22,6 triliun di 2013 menjadi Rp32,5 triliun tahun 2014 dengan target untuk penerimaan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp5,82 triliun di 2013 menjadi Rp6,4 triliun di 2014
- b. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi (naik turun) namun dinilai efektif dengan rata-rata selama 4 tahun sebesar 97,87% dengan persentase setiap tahunnya adalah tahun 2014 sebesar 77,80%, tahun 2015 sebesar 101,86%, tahun 2016 sebesar 104,25%, tahun 2017 sebesar 100,54%, dan tahun 2018 sebesar 104,91%. Hal itu terjadi karena diterbitkannya peraturan mengenai penghapusan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di mana Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor rata-rata per bulan periode Januari-Juni Rp426,84 miliar menjadi Rp502,35 miliar di bulan Juli-Agustus. Pemerintah Provinsi Jakarta memberikan instentif penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah. Penghapusan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berlaku selama 54 hari kalender mulai 27 Juni hingga 31 Agustus 2018.
- c. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi (naik turun) dan dinilai efektif dengan rata-rata selama 4 tahun sebesar 99,42% efektif dengan persentase setiap tahunnya adalah tahun 2014 sebesar 97,51%, tahun 2015 sebesar 91,32%, tahun 2016 sebesar 104,28%, tahun 2017 sebesar 100,28%, dan tahun 2018 sebesar 103,73%. Penurunan persentase efektivitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini terjadi karena penurunan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2016 sebesar 17.865 menjadi 6.216 di tahun 2017.
- d. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2014-2018 berfluktuasi (naik turun) dengan rata-rata selama 4 tahun sebanyak 18,27% (kurang berkontribusi) dengan persentase setiap tahunnya adalah tahun 2014 sebesar 15,92%, tahun 2015 sebesar 18,08%, tahun 2016 sebesar 19,37%, tahun 2017 sebesar 18,24%, dan tahun 2018 sebesar 19,74%. Hal tersebut terjadi karena terdapat penghapusan sanksi administrasi sehingga realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dapat meningkat untuk memberikan kontribusi pada PAD Provinsi DKI Jakarta.
- e. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2014-2018 berfluktuasi (naik turun) dengan rata-rata selama 4 tahun sebesar 13,44% (kurang berkontribusi) dengan persentase setiap tahunnya adalah tahun 2014 sebesar 17,67%, tahun 2015 sebesar 13,91%, tahun 2016 sebesar 13,57%, tahun 2017 sebesar 11,45%, dan tahun

2018 sebesar 12,35%. Rendahnya laju pertumbuhan PAD Provinsi DKI Jakarta bersamaan juga dengan laju pertumbuhan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang naik hingga 6,43% jauh lebih tinggi dari tahun 2017 yang hanya mencapai 0,46%.

- f. Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2014-2018 berfluktuasi (naik turun) dengan rata-rata selama 4 tahun sebesar 3,17% (sangat kurang berkontribusi) dengan persentase setiap tahunnya adalah tahun 2014 sebesar 3,74%, tahun 2015 sebesar 3,66%, tahun 2016 sebesar 2,97%, tahun 2017 sebesar 2,63%, dan tahun 2018 sebesar 2,87%. Hal tersebut terjadi jika dilihat dari laju pertumbuhan PAD Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 yang mencapai 9,50% dari tahun sebelumnya, berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan pajak bahan bakar yang laju pertumbuhannya justru kurang dari tahun sebelumnya atau sebesar minus 11,19%.

dicapai kesepakatan bersama berdasarkan prinsip keadilan.

Badan Pendapatan Daerah seharusnya lebih meningkatkan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Bagi Pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti Pajak Daerah lainnya yang kontribusinya sangat besar terhadap PAD sehingga akan mengarah pada perubahan ke arah yang lebih baik.

6.2. Saran

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dapat mengkaji ulang kriteria kontribusi di mana seharusnya kontribusi di bawah 20% itu baik karena kontribusi adalah satu kesatuan dari semua elemen.

Bagi wajib pajak hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi wajib pajak untuk jujur dan terbuka dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ketika memiliki kendaraan bermotor, sehingga dapat

7. DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2017, Oktober 12). Retrieved From Indonesia.go.id: <https://Indonesia.Go.Id/Profil/Sistem-Pemerintahan/Ekonomi/Pemerintah-Indonesia>
- Agustina, Ruslinda & Rina Arliani. (2015). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012. *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8 (01).
- Amin, F. (2019). *Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Aprilliyana, P. (2017). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada WPOP Samsat Kota Surakarta. Skripsi Jurusan Akuntansi Syariah.
- Arum, Enggar (2011). D.P., Sri Rahayu, & Wahyudi. 2011. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jambi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 13 (01).
- Atmaja, Luthfi Fadillah, Muhamad Evan Reynaldi, & Muhamad Kuriawansyah. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Atas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jamak Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1 (01).
- Atteng, A. G. K., J.B. Kalangi, & J.I. Sumual. (2019). Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02).
- Basya, Mochammad Fahmi. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pendapatan Asli Kota Surabaya. *E-Jurnal Akuntansi "Equity"*, 2 (04).
- Fathiyah. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20 (2).
- Hadi, Seno Sudarmono. (2018). Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta. *Moneter Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5 (02).
- Hasannudin & Heince Wokas. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Accountability*, 3 (01).
- Julastiana, Y., & I Wayan Suartana. (2013). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2 (01).
- Karina, Nurul & Novi Budiarmo. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 4 (01).
- Linus Dj. (2014). *Penjelasan UU 32-2004::Pemerintahan Daerah (Pemda)*. Ngada.org. <https://ngada.org/uu32-2004pjl.htm>
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nurkholis dan Moh. Khusaini. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.

- Prabandaru, Ageng. (2018, September 3). Serba-Serbi Pajak Daerah: Pengertian, Fungsi, Jenis dan Kriteria. Klikpajak; Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/pengertian-pajak-daerah/>
- Octovido, I. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 15(1), 84581.
- Rompis, Natalia Ester Rompis, Ventje Ilat, & Anneke Wangkar. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Jurnal Ilmiah Berkala Efisiensi*, 15 (04).
- Sudarwan, D. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amin, F. (2019). *Penganggaran Di Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Teoritis, Normatif, Dan Empiris*.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Aprilliyana, P. (2017). *Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada Wpop Samsat Kota Surakarta*. Skripsi Jurusan Akuntansi Syariah.
- Atteng, A. G. K., Kalangi, J. B., & Sumual, J. I. (2019). Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02).
- Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah - Open Data Jakarta*. (2020). Jakarta.go.id. <https://data.jakarta.go.id/dataset/data-rencana-dan-realisasi-penerimaan-pajak-daerah>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Apa saja sumber-sumber Pendapatan Daerah?* (2021). Kemenkeu.go.id. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>
- Enggar, S. R. (2011). Wahyudi. 2011. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi*.
- Julastiana, Y., & Suartana, I. W. (2012). Analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten klungkung. *Download: http://www.google.com. Diakses tanggal, 17*.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Linus Dj. (2014). *Penjelasan UU 32-2004::Pemerintahan Daerah (Pemda)*. Ngada.org. <https://ngada.org/uu32-2004pjl.htm>
- Mardiasmo, P. E. R. (2011). Cv Andi Offset.
- Octovido, I. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 15(1), 84581.
- Sudarwan, D. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [JDIH BPK RI]*. (2020). Bpk.go.id. [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003#:~:text=Undang%20undang%20\(UU\)%20ini,pada%20tanggal%2005%20April%202003.&text=Ketentuan%20mengenai%20pengelolaan%20keuangan%20negara,undang%20yang%20mengatur%20perbendaharaan%20negara.](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003#:~:text=Undang%20undang%20(UU)%20ini,pada%20tanggal%2005%20April%202003.&text=Ketentuan%20mengenai%20pengelolaan%20keuangan%20negara,undang%20yang%20mengatur%20perbendaharaan%20negara.)
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009*. (2017,

November 27). PERATURAN PAJAK; PERATURAN PAJAK.
<https://peraturanpajak.com/2017/11/27/undang-undang-republik-indonesia-nomor-28-tahun-2009/>

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI]. (2014).

Bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media.

8. Lampiran 1: Ilustrasi Tabel dan Grafik

Tabel I. 1. Realisasi Penerimaan Pemprov DKI Jakarta

Jenis	2016	2017	2018	2019
PAD	53.784.706.313	64.823.887.370	61.235.824.747	74.776745.638
Dana Perimbangan	15.271.661.453	18.969.291.390	17.855.177.073	21.309.064.176
Lain-lain yang Sah	1.625.027.272	1.953.107.172	53.511.072	2.843.351.308
Pembiayaan Daerah	5.607.751.958	8.711.817.362	17.435.403.144	14.311.606.205

Sumber : Badan Pusat Statistik (statistik.jakarta.go.id)

Tabel I. 2. Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta

Jenis	2016	2017	2018	2019
Bagi Hasil Pajak	12.030.019.209	16.605.608.520	15.026.197.590	18.019.903.810
Lain-Lain PAD yang sah	4.296.140.463	6.287.090.513	4.616.712.395	4.976.570.675
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan PAD yang Dipisahkan	303.204.424	489.478.685	592.956.278	757.628.479
Retribusi Daerah	675.475.066	624.137.344	578.555.604	710.313.000
Pajak Daerah	31.613.197.635	36.500.782.266	37.538.912.327	44.180.000.000

Sumber : Badan Pusat Statistik (statistik.jakarta.go.id)

Tabel I. 3. Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta

Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta, Maret 2018	
Jenis Pajak	Jumlah
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.952.687.822.594
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.290.744.674.900
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	290.876.870.226
Pajak Air Tanah (PAT)	23.059.089.111
Pajak Rokok	0

Sumber : data.jakarta.go.id

Tabel 5.1. Hasil Analisis Data

Tahun	Keterangan	PKB	BBNKB	PBBKB
2014	Target	Rp5.150.000.000.000	Rp6.400.000.000.000	Rp1.200.000.000.000
	Realisasi	Rp4.979.110.607.650	Rp4.979.110.607.650	Rp1.170.105.269.170
	Persentase	96,68%	77,80%	97,51%
	Kriteria	Efektif	Kurang Efektif	Efektif
2015	Target	Rp6.050.000.000.000	Rp 4.600.000.000.000	Rp1.350.000.000.000
	Realisasi	Rp6.090.200.500.774	Rp4.685.403.450.610	Rp1.232.836.931.554
	Persentase	100,66%	101,86%	91,32%
	Kriteria	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif
2016	Target	Rp7.050.000.000.000	Rp4.800.000.000.000	Rp1.050.000.000.000
	Realisasi	Rp7.143.530.355.999	Rp5.003.996.134.800	Rp1.094.901.392.986
	Persentase	101,33%	104,25%	104,28%
	Kriteria	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
2017	Target	Rp7.750.000.000.000	Rp5.000.000.000.000	Rp1.150.000.000.000
	Realisasi	Rp8.005.898.498.574	Rp5.027.240.287.850	Rp1.153.231.799.802
	Persentase	103,30%	100,54%	100,28%
	Kriteria	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
2018	Target	Rp8.350.000.000.000	Rp5.100.000.000.000	Rp1.200.000.000.000
	Realisasi	Rp8.553.632.204.643	Rp5.350.625.602.850	Rp1.244.763.661.522